

BIMBINGAN TEKNIS BAGI TKPK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

untuk Penyusunan RPKD, RAT dan LP2KD

3, 4 dan 5 November 2020



MODUL 1

KERANGKA ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

MENGAPA PERLU RPKD

“Kemiskinan itu kompleks dan multidimensi”

- Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. RPKD dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya.

“Beda daerah beda masalah”

- Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro). RPKD dalam hal ini perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal.

“Ada masalah yang perlu diprioritaskan penanganannya”

- Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. RPKD dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

KAPAN RPKD DISUSUN

1. Karena RPKD bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD
2. RPKD berlaku untuk lima tahun

SIAPA YANG MENYUSUN RPKD

1. TKPK dan Tim Teknis
2. Pakar (dari Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian)
3. Tim Penyusun RPJMD
4. Unsur lain yang diperlukan

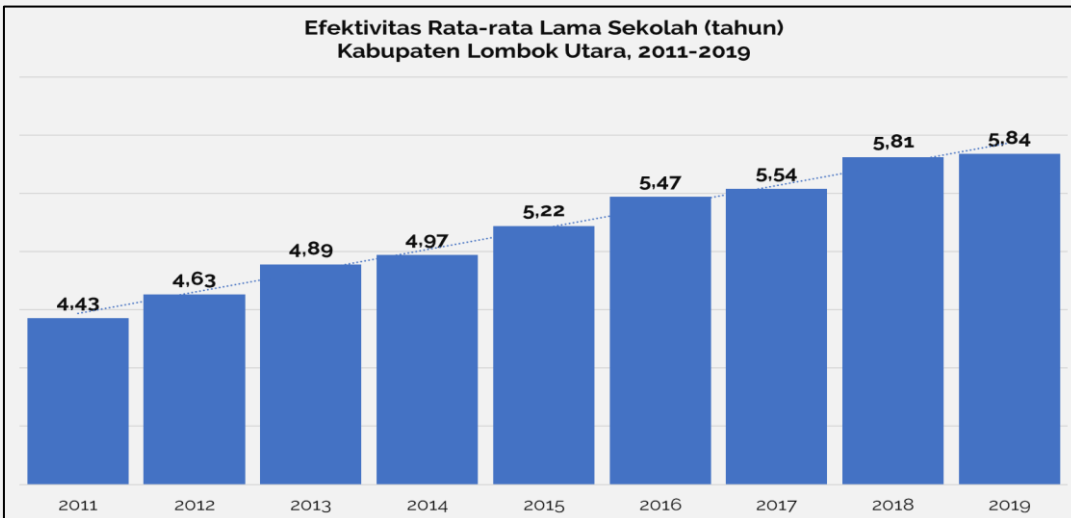
SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

1. PENDAHULUAN
2. KONDISI UMUM DAERAH
3. PROFIL KEMISKINAN DAERAH
4. PRIORITAS PROGRAM
5. LOKASI PRIORITAS

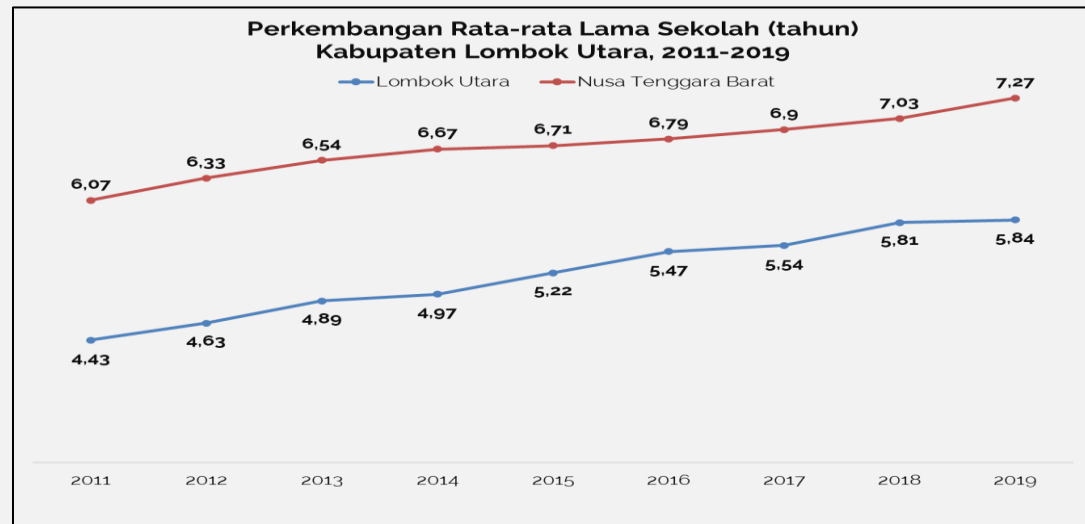
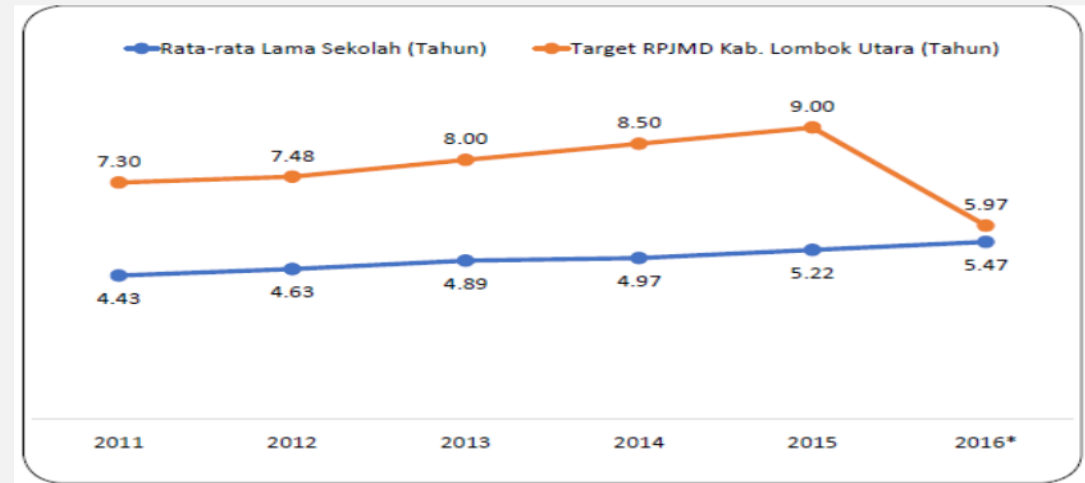
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK MASALAH (2)

Indikator Pendidikan Kabupaten Lombok Utara	Indikator Capaian 2015	Target RPJMD 2015
Rata-rata Lama Sekolah	5,22 Tahun	9 tahun
Angka Melek Huruf (%)	81,38	100
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A (%)	108,53	102,87
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B (%)	91,43	100
Angka Partisipasi Kasar SM/MA/Paket C (%)	75,07	85,00
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	97,61	99,95
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (%)	78,4	95,00
Angka Partisipasi Murni SM/MA/Paket C (%)	56,43	75,00

Sumber: BPS dan RPJMD Kab. Lombok Utara 2011-2015

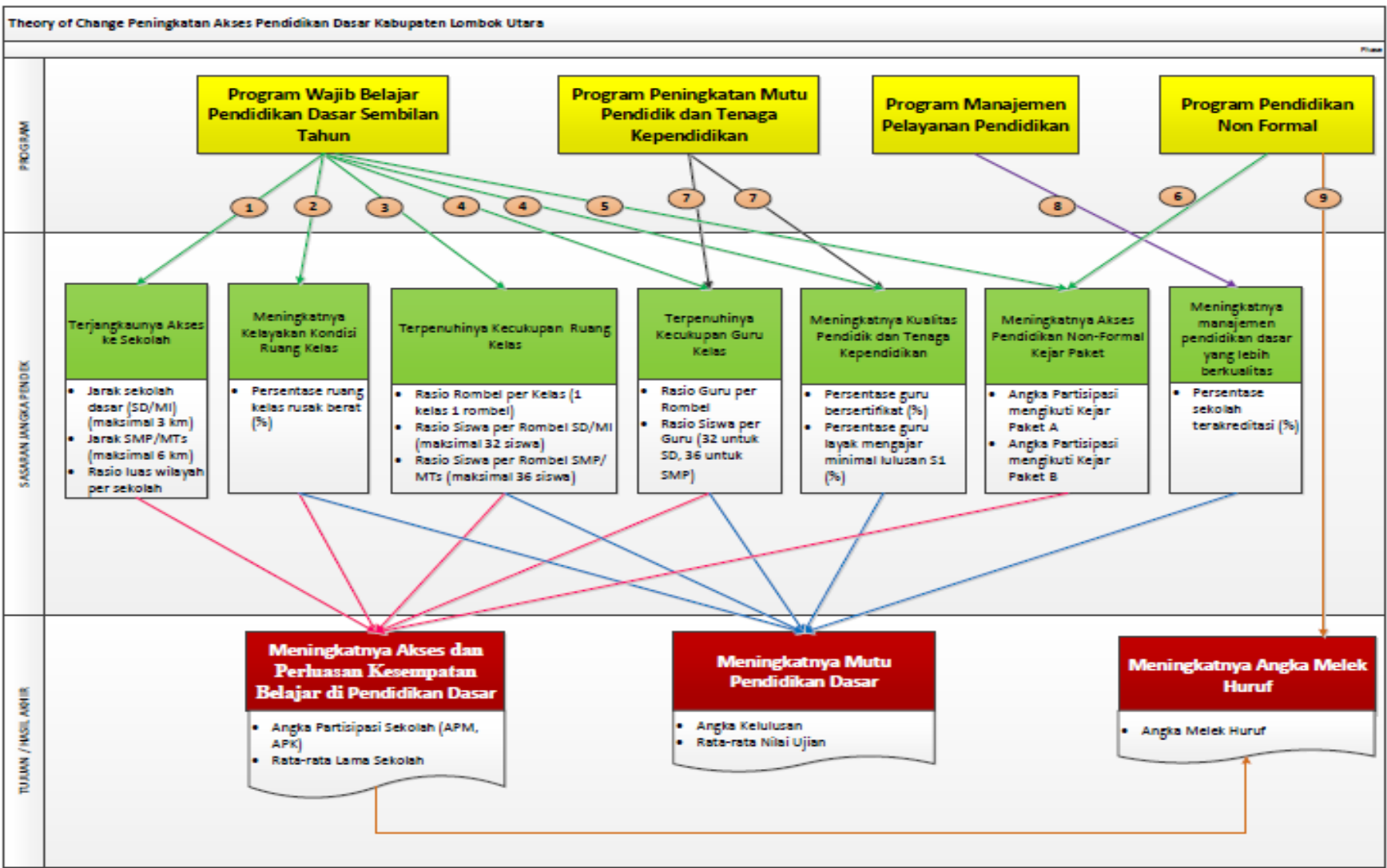


Perkembangan Rata-rata lama Sekolah Kabupaten X



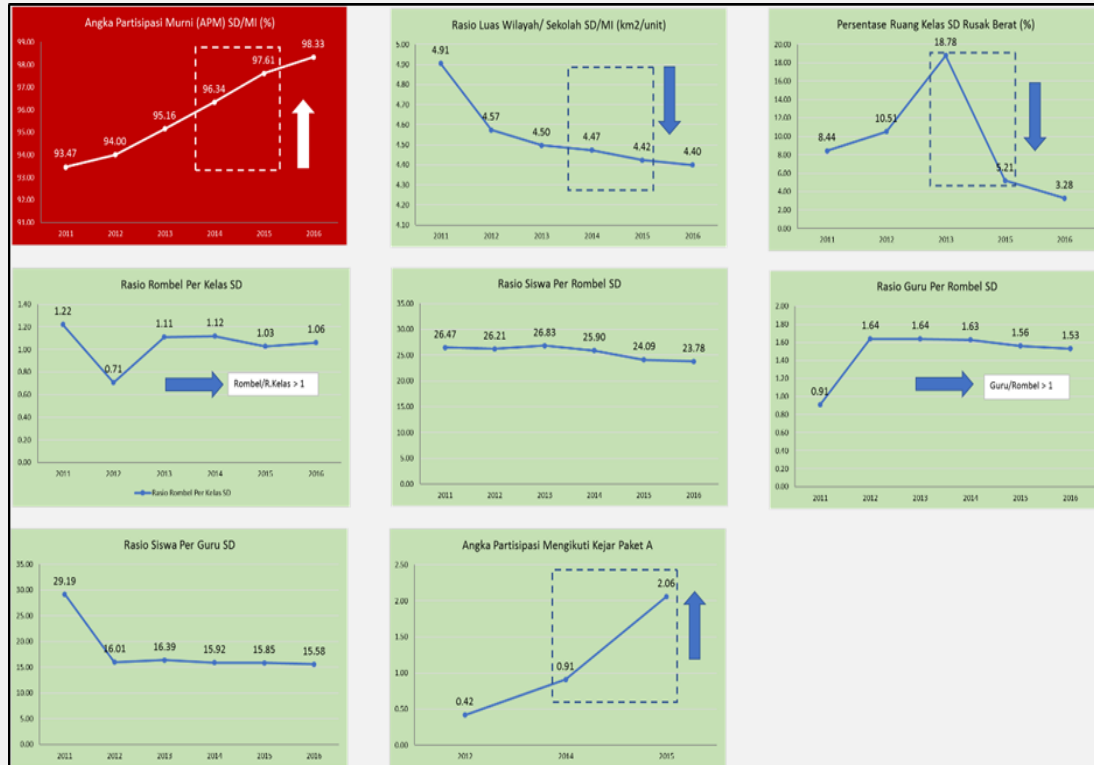
IDENTIFIKASI PRIORITAS INTERVENSI (1)

THEORY OF CHANGE

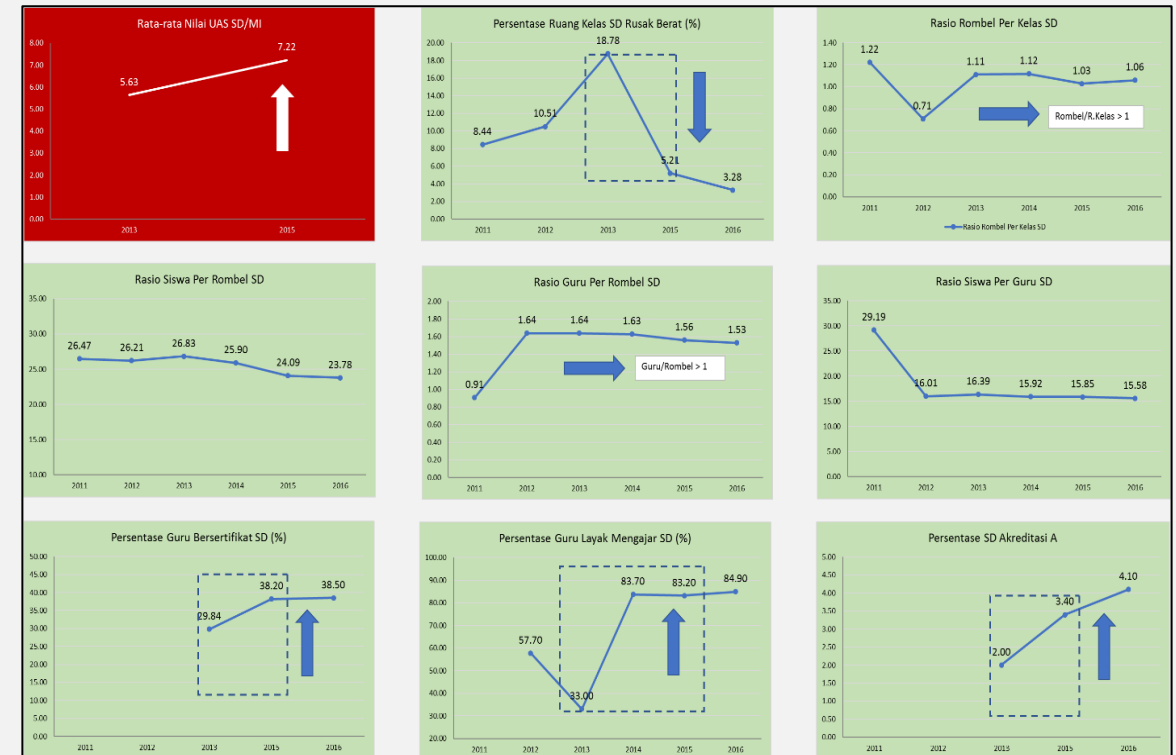


IDENTIFIKASI PRIORITAS INTERVENSI (2)

AKSES



MUTU



ANALISIS KETERKAITAN

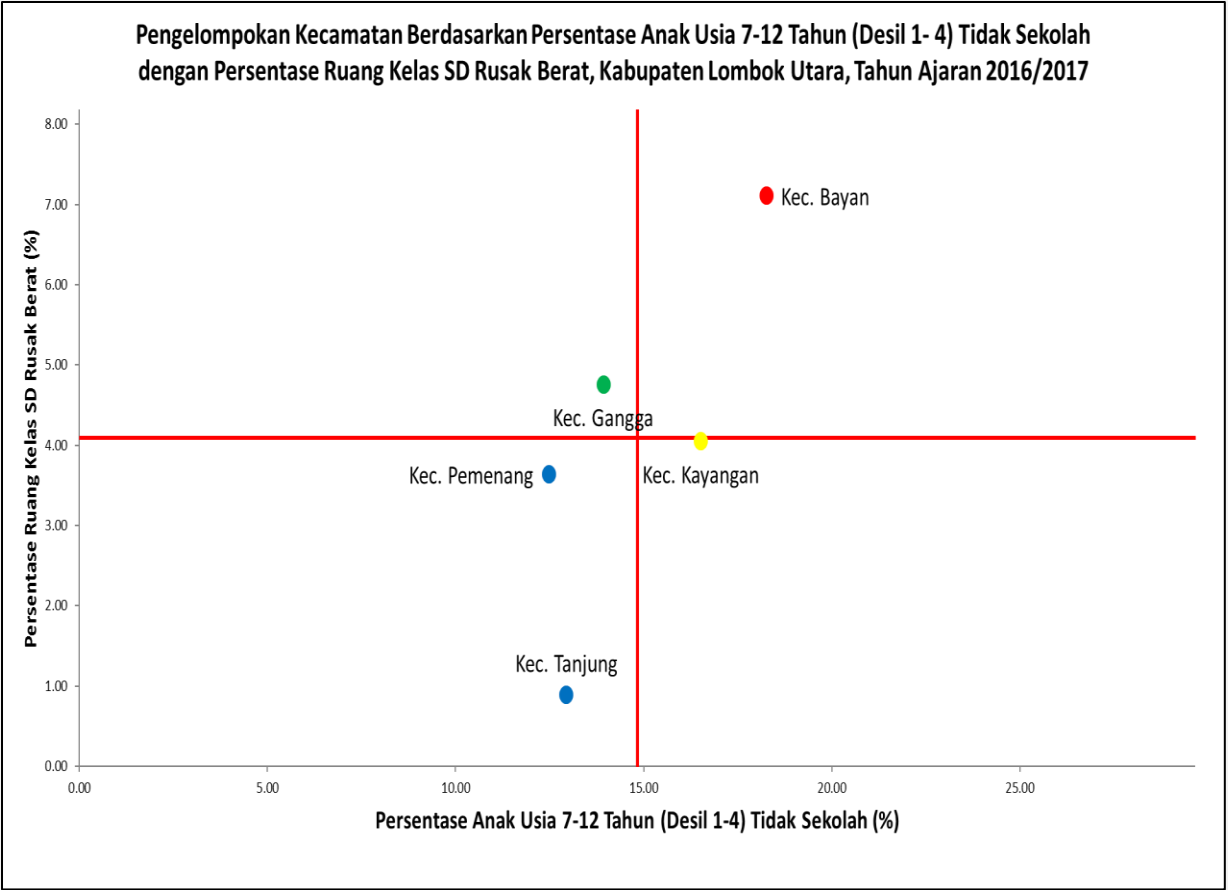
IDENTIFIKASI **PRIORITAS WILAYAH**

**PRIORITAS INTERVENSI
PENINGKATAN AKSES
PENDIDIKAN**

- Peningkatan akses infrastruktur ke Sekolah Dasar.
- Peningkatan kualitas ruang kelas.
- Penyelenggaraan program Kejar Paket A setara SD
- Penambahan ruang kelas Sekolah Dasar
- Regrouping atau penggabungan sekolah
- Distribusi guru yang merata

**PRIORITAS INTERVENSI
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN**

- Peningkatan kualitas ruang kelas.
- Peningkatan mutu tenaga pendidik SD melalui sertifikasi guru.
- Peningkatan mutu tenaga pendidik SD melalui peningkatan kualifikasi tenaga pendidik SD (minimal S1/D-IV).
- Peningkatan pelaksanaan akreditasi sekolah dasar.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung (perpustakaan)



PRIORITAS INTERVENSI

PRIORITAS WILAYAH

IDENTIFIKASI **MODUS INTERVENSI**



BELANJA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN KABUPATEN X

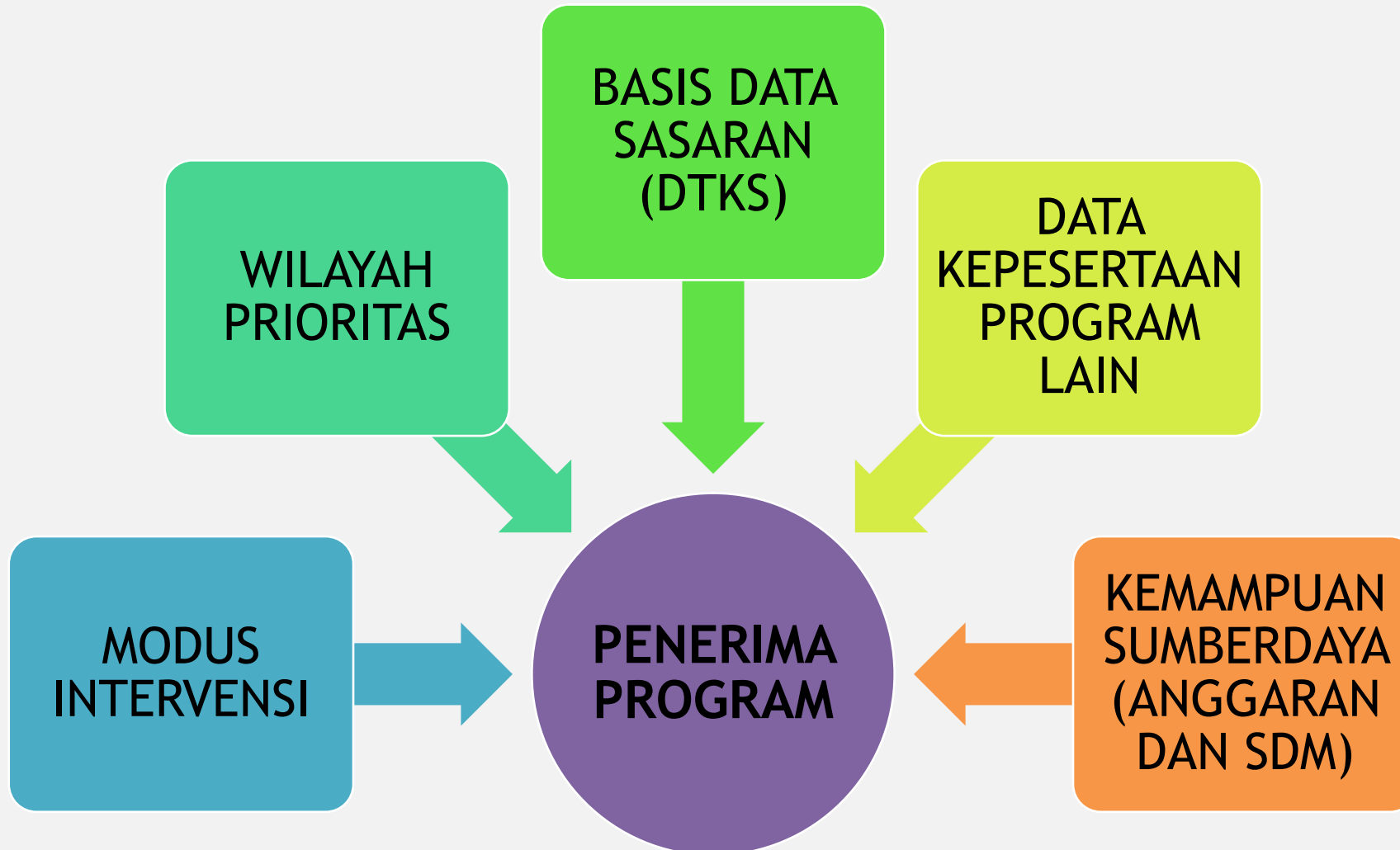
KECUKUPAN BIAYA PELAYANAN

IP	PROGRAM	VOLUME	SATUAN	HARGA	TOTAL
2	Pembangunan RKB SD/MI	7	unit	165.000.000	1.155.000.000
	Pembangunan RKB SMP/MTs	27	unit	165.000.000	4.455.000.000
	Pengadaan Meja Siswa SD/MI	598	buah	420.900	251.698.200
	Pengadaan Kursi Siswa SD/MI	670	buah	323.800	216.946.000
	Pengadaan Meja Siswa SMP/MTs	369	buah	453.200	167.230.800
	Pengadaan Kursi Siswa SMP/MTs	342	buah	365.100	124.864.200
	Pengadaan Papan Tulis	21	buah	1.218.300	25.584.300
Jumlah					6.396.323.500
5,6,7,8,9	Sertifikasi Guru	4	tahun	50.000.000	200.000.000
Jumlah					200.000.000
15	Pengadaan Buku Teks SD	14.471	set	150.000	2.170.650.000
	Pengadaan Buku Teks MI	2.682	set	150.000	402.300.000
Jumlah					2.572.950.000
16	Pengadaan Buku Teks SMP	4534	set	300.000	1.360.200.000
	Pengadaan Buku Teks MTs	3445	set	350.000	1.205.750.000
Jumlah					2.565.950.000

Berdasarkan *e-costing SPM* Pendidikan, biaya pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten X untuk empat tahun anggaran (2017-2020) sebesar Rp. 43.612.511.200

Sumber: SPM Pendidikan Dasar, Dikpora

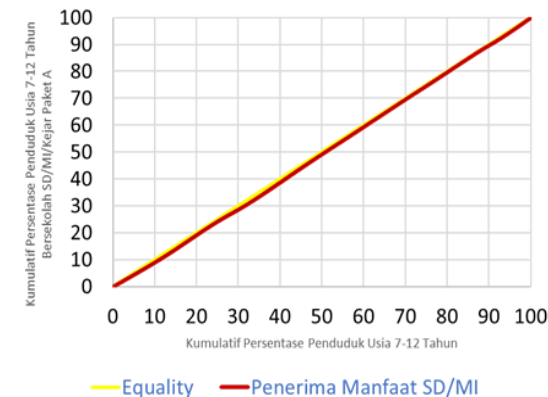
IDENTIFIKASI PENERIMA PROGRAM BERSASARAN LANGSUNG



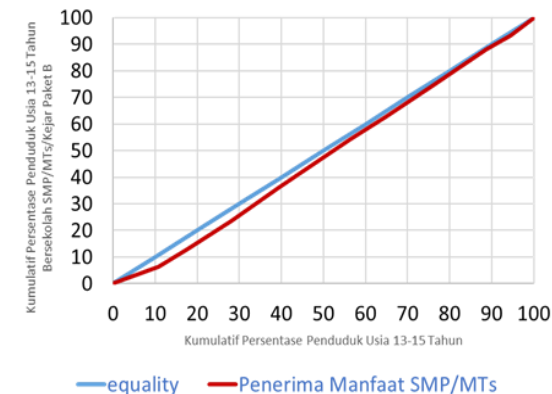
BAHAN PENYUSUNAN BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN PENYUSUNAN RAT

Sasaran	Prioritas intervensi	Program dan Kegiatan (modus operandi)
Meningkatnya partisipasi pendidikan usia sekolah	Penyelenggaraan program kejar paket dipadukan dengan pemberdayaan ekonom	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: - Penyelenggaraan Paket A Setara SD - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu menuju pemenuhan SPM secara berkeadilan baik bagi sekolah negeri maupun swasta	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: - Penambahan ruang kelas baru - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah - Pembangunan perpustakaan sekolah - Pengadaan buku dan alat tulis siswa - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Pengadaan mebeluer sekolah - Pelatihan Penyusunan kurikulum

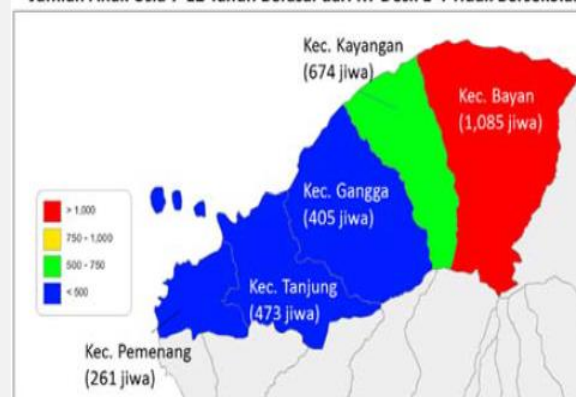
Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A)



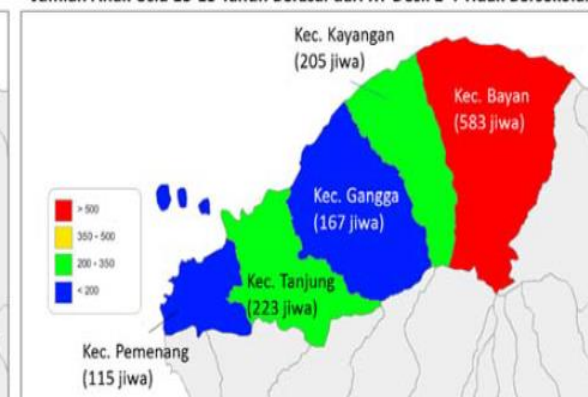
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)



Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun Berasal dari RT Desil 1-4 Tidak Bersekolah



Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun Berasal dari RT Desil 1-4 Tidak Bersekolah



MODUS INTERVENSI

PENERIMA MANFAAT PROGRAM

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Hasil analisis identifikasi masalah dan hasil analisis prioritas intervensi (dengan ToC dan analisis keterkaitan) serta analisis anggaran menjadi bahan penyusunan isu strategis, yang kemudian dijabarkan ke dalam **Matriks Prioritas Program**.
- Matriks prioritas program ini memuat informasi rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam **jangka waktu lima tahun**.

Matriks Prioritas Program

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Target										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	Pendidikan																
2	Kesehatan																
3	Perumahan dan Permukiman																
4	Sosial																
5	Pembangunan Desa																
6	Ketenagakerjaan																
7	Ketahanan Pangan																
8	Pertanian dan perkebunan																
9	Kelautan dan perikanan																
10	Dst																

MODUL 2

Pengenalan Aplikasi Analisis

MODUL 3

RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)

1. **Rencana Aksi Tahunan** merupakan penjabaran dari **Matriks Prioritas Program** penanggulangan kemiskinan lima tahun di dalam RPKD
2. **Rencana Aksi Tahunan** adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk **periode satu tahun**, yang memuat informasi:
 - ☐ Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - ☐ Kebijakan dan strategi tahun berjalan
 - ☐ Matriks target keberhasilan serta
 - ☐ Lokasi prioritas.

Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		
										Kinerja	Pagu	
1	Pendidikan											
2	Kesehatan											
3	Perumahan dan Permukiman											
4	Pembangunan Desa											
5	Ketenagakerjaan											
6	Ketahananpangan											
7	Pertanian dan perkebunan											
8	Kelautan dan perikanan											
9	Sosial											
10	Dst											

MODUL 4

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)

1. PENDAHULUAN
2. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3. CAPAIAN DAN ANALISIS
4. RENCANA TINDAK LANJUT
5. PENUTUP

Bahan Bab II LP2KD

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; berisi informasi sekurang-kurangnya:

- ☐ Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan
- ☐ Hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- ☐ Penanganan pengaduan masyarakat
- ☐ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan

Bahan Bab III LP2KD

Capaian dan Analisis; berisi informasi sekurang-kurangnya:

1. Program penanggulangan kemiskinan
2. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan
 - ☐ Pada bagian ini (a), melaporkan capaian kinerja kemiskinan konsumsi pada tahun terakhir, yaitu:
 - a. Persentase penduduk miskin (P0)
 - a. Jumlah penduduk miskin
 - b. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
 - c. Indeks keparahan kemiskinan (P2)
 - d. Garis kemiskinan (Rp)
 - ☐ Pada bagian ini memberikan gambaran dan analisis singkat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di susun di dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Bahan Bab IV LP2KD

Pada bagian ini diisi dengan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk penyempurnaan. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai antara **Program Prioritas, Rencana Aksi Tahunan** dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Rencana tindaklanjut ini **dapat dirumuskan berdasar OPD pelaksana program atau berdasarkan isu-isu program-program tertentu** agar adanya perbaikan di tahun yang akan datang.

Bahan Bab V LP2KD

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan merupakan **rekomendasi atas seluruh temuan; baik isu kebijakan, isu kelembagaan, isu pelaksanaan, maupun hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di daerah**. Bentuknya dapat berisi:

- a. Pernyataan rekomendasi perbaikan
- b. Ditujukan kepada pemangku kepentingan maupun OPD pelaksana

TERIMA KASIH